

ABSTRAKSI

Dalam kegiatan perniagaan tidak dapat dipungkiri akan menimbulkan dampak terhadap praktik bisnis, antara lain persaingan yang tajam bahkan mengarah ke persaingan tidak sehat (*unfair competition*). Pada tahun 2015 Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, menemukan bentuk persaingan tidak sehat yaitu penggunaan klorin dalam pembalut wanita yang beredar dipasaran. Dengan demikian penelitian ini akan membahas bagaimana pengaturan hukum atas peredaran pembalut yang mengandung klorin dipasaran dan bagaimana perlindungan hukum khususnya perlindungan konsumen terhadap peredaran pembalut yang mengandung klorin. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan *Guidance for Industry and FDA Staff Menstrual Tampons and Pads: Information for Premarket Notification Submissions (510(k)s)* yang dikeluarkan oleh Food and Drug Administration Amerika Serikat penggunaan klorin dalam pembalut dapat dilakukan dengan menggunakan metode *Elemental Chlorine-Free* (ECF) atau *Totally Chlorine-Free* (TCF). Namun, sampai saat ini belum dilakukan pengujian kembali terhadap kadar klorin dalam pembalut wanita yang beredar dimasyarakat. Selain itu, pengaturan penggunaan klorin belum diatur dalam peraturan hukum di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan suatu bentuk perlindungan hukum untuk menegakkan hak-hak konsumen yang tercederai. Adapun implementasi perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen pengguna pembalut wanita sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah meminta tanggung jawab pelaku usaha yang berupa ganti rugi, pembinaan dan pengawasan peredaran pembalut oleh Pemerintah, meminta bantuan hukum kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya, atau menyelesaikan sengketa konsumen melalui pengadilan.

Kata Kunci: Perlindungan, Pembalut, Klorin.

ABSTRACT

It is undeniable that trading activities will have an impact on business practices, including sharp competition and even lead to unfair competition. In 2015 the Indonesian Consumers Foundation found a form of unfair competition, namely the use of chlorine in pads on the market. Therefore, this research will discuss how to regulate the circulation of chlorine-containing sanitary napkins on the market and how to provide legal protection, especially consumer protection against the distribution of chlorine-containing sanitary napkins. This study uses a normative juridical method.

The results showed that based on the Guidance for Industry and FDA Staff Menstrual Tampons and Pads: Information for Premarket Notification Submissions (510(k)s) issued by the United States Food and Drug Administration, the use of chlorine in tampons can be done using the Elemental Chlorine- Free. (ECF) or Completely Chlorine Free (TCF). However, until now there has been no re-testing of chlorine levels in pads circulating in the community. In addition, regulation on the use of chlorine has not been regulated in Indonesian law. Based on this, we need a form of legal protection to uphold the rights of consumers who are harmed. As for the implementation of legal protection given to consumers who use sanitary napkins in accordance with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, it requires business actors to take responsibility in the form of compensation, guidance and supervision of the distribution of sanitary napkins by the Government, requesting legal assistance from the Protection Agency. National Consumers. or the Self-Help Consumer Protection Agency, or resolve consumer disputes through the courts.

Keywords: Protection, Pads, Chlorine.